

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG JALAN TERHADAP KONDISI JALAN
RUSAK DI DESA TELUK BARU KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MUHAMMAD NOVALDI

NPM: 2022422

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : MUHAMMAD NOVALDI
NPM : 2022422
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP
KONDISI JALAN RUSAK DI DESA TELUK BARU
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP
NUPTK. 1635759660230382



Moh. Fajar Noorahman, M.Psi
NUPTK. 7933769670130322

Mengetahui



Ketua Program Studi Administarsasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, Tuhan semesta alam. tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikannya proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP KONDISI JALAN RUSAK DI DESA TELUK BARU KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** Adapun proposal skripsi ini dibuat sebagai syarat pengajuan penelitian agar selanjutnya dapat diselesaikan menjadi sebuah skripsi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, namun penulis berharap semoga hasil penulisan proposal skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembacanya.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teortis	10
C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	39
B. Pendektan Penelitian	39
C. Tipe Penelitian.....	40
D. Data dan Sumber Dataf	41
E. Desain Oprasional Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Uji Krebilas Data	47
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	42
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hukum, ketentuan mengenai kondisi jalan yang rusak telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan “pembangunan jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan desa”. Selain itu, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang “Si Palui Raja Adat” (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Dan Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada BAB VI (Tanggung Jawab Oprasional) Pasal 10 ayat (2).

Jalan merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di Indonesia yang memiliki geografi beragam dan populasi yang tersebar luas. Seiring dengan perkembangan zaman, taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, yang seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas serta angkutan jalan yang memadai. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Namun, di tingkat desa, tantangan seperti kerusakan jalan sering kali menjadi hambatan utama yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Kerusakan jalan desa, yang sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, beban berlebih dari kendaraan, kurangnya pemeliharaan, dan penggunaan bahan konstruksi yang tidak sesuai, dapat meningkatkan risiko

kecelakaan, memperpanjang waktu perjalanan, serta menghambat aksesibilitas ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan.

Negara memiliki tanggung jawab utama atas keselamatan setiap warga negaranya, termasuk melindungi mereka dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Terhadap ancaman seperti kerusakan jalan yang dapat memicu kecelakaan fatal, negara melalui kekuasaan legislatifnya menempuh berbagai cara, salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah dan melindungi keselamatan warga.

Di desa-desa Indonesia, di mana jalan sering kali belum beraspal atau dalam kondisi buruk, pengujian kendaraan bermotor memiliki relevansi yang lebih tinggi. Kerusakan jalan desa sering kali diperparah oleh kendaraan berat atau kendaraan yang tidak terawat, seperti truk pengangkut hasil pertanian atau angkutan umum yang melampaui kapasitas. Jika kendaraan tersebut tidak melalui pengujian rutin, mereka dapat menyebabkan deformasi permanen pada permukaan jalan, memperdalam lubang, atau bahkan menyebabkan longsor di daerah rawa yang notabeneanya struktur tanah tidak kokoh seperti tempat yang saya teliti ini di Desa Teluk Baru.

Desa Teluk Baru yang berada di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung antar wilayah permukiman masyarakat serta akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum. Keberadaan jalan desa yang layak fungsi sangat berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya

dalam menunjang aktivitas pertanian, perdagangan, serta kegiatan sosial lainnya. Namun, pada kenyataannya kondisi infrastruktur jalan di Desa Teluk Baru masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah desa maupun pihak terkait.

Kondisi kerusakan jalan desa di Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam menangani kerusakan jalan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sehingga muncul lah fenomena masalah, yaitu :

1. SDM dari Dinas PUPR tidak kompeten dalam perencanaan perbaikan jalan yang rusak, Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 3 Perencanaan Teknis Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi “Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan”. Penjelasan dari Pasal 35 Ayat ini Adalah Dinas PUPR harus memiliki pemahaman yang mantap dalam membuat perencanaan teknis di bidang jalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kriteri perencanaan dalam pengemplementasiannya..

(Sumber: Observasi di lapangan)

2. Kondisi jalan yang rusak berdampak kepada aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi lambat, Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan Paragraf 2, Pasal 32 ayat (1) bagian (a) yang berbunyi “mempercepat mobilitas barang atau orang”. Dapat diartikan dalam Pasal 32 ayat (1) bagian (a) ini jika jalan dalam kondisi mantap tidak seperti kondisi saat ini di jalan Desa Teluk Baru sudah terbilang sangat-sangat parah sehingga mobilitas masyarakat menjadi sangat lambat, seperti akses ke fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan.

(sumber: Observasi di lapangan)

3. Tidak ada koordinasi antara PUPR kepada Kepala Desa dan masyarakat. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 BAB VIA Data dan Informasi, Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi “Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi”. Data yang ada di Dinas PUPR sebelum pembangunan perbaikan jalan di RT. 4 yaitu lebar 11 Meter, setelah Kepala Desa mengetahui lebar jalan yang akan dibangun 11 Meter Kepala Desa Mengusulkan lebar 8 Meter, jika lebar jalan yang dibangun 11 Meter akan mengenai halaman atau tanah milik warga. Akan tetapi pihak Dinas PUPR tidak merubah data dari usulan Kepala Desa, hingga saat dibangun tetap lebar 11 Meter dan mengenai halaman atau tanah milik warga.

(Sumber: Observasi di lapangan)

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar peneliti lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka peneliti ini mengambil teori oleh menurut teori Edward III (1980) yang berkaitan dengan sub variabel implementasi kebijakan yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang saya jelaskan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penanganan kerusakan jalan di Desa Teluk Baru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penanganan kerusakan jalan di Desa Teluk Baru

Adapun Manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk beraktivitas dan mobilitas berjalan normal tanpa ada hambatan oleh jalan yang rusak. Jalan merupakan komponen penting untuk masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan hingga aktivitas sehari-hari. Jika jalan yang digunakan layak fungsi maka mobilitas masyarakat akan terlaksana lebih cepat dan aman.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, khususnya terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan kewajiban pelaksana penyelenggaraan jalan agar gerak cepat dalam memperbaiki jalan yang rusak di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini juga menambah wawasan saya bagaimana koordinasi antara instansi pemerintah dalam perbaikan jalan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitut:

1. Made Sandiasa. 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Politeknik Negeri Bali **“ANALISIS KERUSAKAN PERKERASAN JALAN DESA SEBUDI BANJAR BADEG KELODAN KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”**.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan jalan di Desa Sebudi Banjar Badeg Kelodan Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang dipicu oleh beban lalu lintas berat, terutama truk pengangkut pasir, sehingga memengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi jenis kerusakan, menilai tingkat kondisi perkerasan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI), serta menghitung kebutuhan biaya perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan. Metode penelitian meliputi survei lapangan pada ruas jalan sepanjang 3 km yang dibagi menjadi 30 segmen, pengamatan visual terhadap jenis dan tingkat kerusakan, pengolahan data dengan metode PCI, hingga analisis

biaya perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kerusakan yang dominan meliputi retak kulit buaya, retak tepi, retak memanjang, lubang, ambblas, tambalan, cekungan, dan keriting dengan nilai PCI rata-rata pada kategori poor hingga very poor, sehingga memerlukan tindakan perbaikan rekonstruksi dan overlay. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menunjukkan kebutuhan dana sekitar Rp 6,8 miliar untuk seluruh segmen.

2. Lifia Astrina. 2023. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Gambar. Tujuannya adalah untuk memahami peran pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Soekanto (2012:212). Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun XVI dan masyarakat. Hasil penelitian peran pemerintah desa belum mampu pemerataan pembangunan karena wilayahnya sudah menjadi daerah aliran sungai dan milik perseorangan. Faktor penghambat: sumber daya keuangan dan ketersediaan lahan.
3. Septiana Effendi. 2024. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro **“PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (STUDI KASUS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG**

TENGAH)”. Jalan merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Perubahan kedua atas UU Jalan melalui UU Nomor 2 Tahun 2022 memberikan mandat baru, khususnya pada Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Lampung Tengah, kondisi jalan rusak masih menjadi persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat karena menghambat mobilitas dan distribusi barang. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pengawasan jalan kabupaten di Lampung Tengah, dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perbaikan jalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya menjalankan fungsinya, namun pengawasan dan perbaikan belum berjalan optimal sesuai amanat undang-undang terbaru. Hal ini disebabkan karena luasnya jaringan jalan kabupaten yang tidak sebanding dengan ketersediaan armada dan personel lapangan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi: Keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pemeliharaan rutin, adanya kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase besar (melebihi kelas jalan), serta lambatnya proses koordinasi antara

pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dalam mengusulkan perbaikan melalui skema Inpres Jalan Daerah. Selain itu, faktor cuaca ekstrem juga mempercepat kerusakan jalan yang baru saja diperbaiki sehingga anggaran seringkali habis untuk penanganan darurat daripada pembangunan permanen.

B. Tinjauan Teoris

1. Kebijakan Publik

Dalam Buku Kebijakan Publik (Ika Widiastuti, 2022:2) Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam Buku Arafat (2023:1-2) Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada.

Dalam Buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2020:16) Menurut Anderson (1990:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*" Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Definisi ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang melibatkan beberapa konsep kunci, antara lain:

- a. Proses kebijakan: Kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Proses ini melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- b. Tujuan publik: Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, melindungi lingkungan, dan menjaga keadilan sosial.
- c. Pengambilan keputusan: Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan analisis berbagai faktor, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Keputusan ini biasanya didasarkan pada informasi yang dikumpulkan,

penilaian risiko, dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam Buku Teori Kebijakan Publik (Iriawan, 2024:95) kebijakan publik merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik yang melibatkan pengembangan pilihan-pilihan strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan telah diangkat menjadi isu dalam agenda publik. Formulasi kebijakan ini dapat dipahami sebagai tahap perumusan alternatif-alternatif solusi untuk menangani persoalan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, formulasi berfungsi untuk merumuskan batasan dan ruang lingkup kebijakan yang akan diterapkan; dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mampu memberikan solusi yang relevan dan efektif

Dalam buku Kebijakan Publik, Taufiqurokhman (2024:13) Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Dalam Buku Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik

(Marwiyah, 2022:13) Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam *Journal of Community Positive Practices*, Khan (2016) The term “policy implementation” has been defined by many scholars from various perspectives. Implementation is an important stage of the policy-making process. It means the execution of the law in which various stakeholders, organisations, procedures, and techniques work together to put policies into effect with a view to attaining policy goals (Stewart et al., 2008). Implementation can be viewed as a process, an output and an outcome, and it involves a number of actors, organisations and techniques of control. It is the process of the interactions between setting goals and the actions directed towards achieving them (Pressman & Wildavsky, 1973). Simon (2010) views implementation as the application of the policy by government administrative machinery in order to achieve the goals. Specifically, policy implementation encompasses those actions by public and private individuals that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions (Meter & Horn, 1975). The constituent element of most cited definitions of implementation is the gap that exists between policy intent and outcomes (Maznamin & Sabatier, 1989; Smith & Larimer, 2009). Implementation studies, therefore, place emphasis on understanding the success or failure of public policy by elaborating on factors that affect it. This concept of implementation helps to draw the

attention of policy makers and implementers to study the processes that influence and establish the outcome of public policy (Bempah, 2012).

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam faktor berbeda yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi yaitu:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Variabel ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktorfaktor ini mencakup jumlah sumber daya keuangan yang tersedia, tingkat dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (seperti penerimaan atau penolakan), sifat opini publik mengenai lingkungan hidup, dan tingkat dukungan dari elit politik.

6) Disposisi Implementor

Disposisi pelaksana ini terdiri dari tiga elemen penting: (a) persepsi pelaksana kebijakan, yang mempengaruhi kesiapannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut; (b) pemahaman atau kognisi pelaksana kebijakan; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, atau nilai-nilai yang dianut oleh pelaksana (Disa dan Friska, 2025:5-6)

Dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik”, Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variable kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi. Adapun secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Terdapat tiga aspek pokok yaitu : transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b. Sumberdaya

Terdapat empat aspek pokok yaitu : Staf (*Stafs*), Informasi (*Information*), Wewenang (*Authority*), Fasilitas-fasilitas (*Facilities*).

c. Disposisi

Terdapat dua aspek pokok yaitu : Pengangkatan Birokrat, Insentif.

d. Struktur Birokrasi

Terdapat dua aspek pokok yaitu : *Standar Operating Prosedurs* (SOP), dan *Fragmentasi*.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Buku Ika Widiastuti yang berjudul kebijakan publik, (2022:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa “*The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.*”(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Henry (1998:33) sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam

keseluruhan proses kebijakan publik. Misalnya, adanya beberapa kelompok kepentingan penentang kebijakan yang berusaha untuk mengganjal bahkan memboikot usaha dari berbagai pendukung kebijakan yang ada dan serta merta dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Rhodes, N (Wahab:2004:29). Dengan demikian sukses dan gagalnya suatu kebijakan publik, akhirnya dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan berbagai kelompok kepentingan dominan yang mungkin terdiri atas berbagai koalisi kepentingan yang memaksakan kehendak. Dalam kondisi tertentu distribusi kekuasaan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan publik secara formal telah diarahkan.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “Organis” Nampak relevan untuk implementasi kebijakan. ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tatakelola beserta berbagai teknik dan metode yang ada. Prosedur dimaksud diantaranya terkait dengan proses

penjadwalan (*scheduling*) perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*) kebijakan publik. Wujud pendekatan managerial ini diantaranya dapat ditemui pada perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control*) atau disebut NPC. Pendekatan ini menggambarkan suatu kerangka kerja dimana proyek dapat direncanakan dan proses implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi berbagai tugas yang harus diselesaikan, urutan pelaksanaan waktu bahkan anggaran yang dikeluarkan.

d. Pendekatan Perilaku

Analisis keprilakuan (*behavioral analysis*) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai “*Organitational development*” atau pengembangan organisasi. Pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keprilakuan (Eddy, 1981:72). Selain itu, pengembangan organisasi juga merupakan salah satu bentuk konsultasi manajemen dimana seorang konsultan bertindak selaku agen perubahan untuk mempengaruhi seluruh budaya organisasi yang ada termasuk pada dimensi sikap dan perilaku pejabat yang menduduki posisi kunci. (Ika Widiastuti 2022:48-50)

Implementasi atau penerapan kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki beberapa

jenis model seperti model implementasi dari Grindle, model Implementasi Edward III, model Implementasi oleh Meter dan Horn, dan model Luther Gullick.

Menurut Grindle suatu implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan yang diraih. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadila (2022) dikenal dengan "*implementation as a political and administrative process*". Grindle mengemukakan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) dilihat dari prosesnya, sudah atau belum sesuai dengan design (ketentuan) yang merujuk pada aksi kebijakannya, dan 2) tercapainya suatu kebijakan. Dimensi ini dapat diukur dari dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh variabel-variabel implementasi yang terdiri atas:

1) Isi kebijakan (*Content Of Policy*) antara lain:

- a. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest effected*). Berbagai kepentingan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
- b. Tipe manfaat (*Type of benefits*). Suatu kebijakan harus menghasilkan beberapa jenis manfaat yang positif.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*). Setiap kebijakan publik harus memiliki target capaian dengan skala yang jelas.

- d. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*). Salah satu proses penting dalam implementasi kebijakan publik ialah pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk memastikan sebuah program yang telah dibuat tersebut sudah tepat.
 - e. Pelaksanaan program (*Program implementer*). Program yang dijalankan berdasarkan suatu kebijakan yang kompeten dan memiliki kapabilitas.
 - f. Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*). Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Lingkungan Implementasi (*Content Of Impelementation*) yaitu terdiri dari:
- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involed*).
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institusion and regimcharacteristic*).
 - c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*compilance and responsiveness*).

Dalam pernyataan yang lain, Meter dan Horn (1975) dalam Kurniawan dan Maani (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel pendukung. Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dikenal dengan “A model of Policy Impelemntation” Dalam model ini Meter dan Horn

menjelaskan bahwa kinerja publik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang dimaksud antara lain:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang bersifat realistik dan sosio-kultur. Dalam Kurniawan dan Maani (2020) Meter dan Horn mengatakan bahwa: “untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan [ada standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut”.
- b. Sumber daya. Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ada tiga sumber daya yang harus diperhatikan yaitu: a) manusia yang berkualitas (tenaga kerja); b) sumber daya finansial menentukan terlaksananya suatu kebijakan, dan; c) sumber daya waktu terlaksananya suatu kebijakan yang telah ditetapkan Sumber daya tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- c. Karakteristik dan pelaksana. Organisasi formal maupun organisasi informal menjadi agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan oleh agen yang sesuai dengan ciri-ciri yang tepat. Penentuan karakteristik agen pelaksana dapat ditentukan melalui luas wilayah kebijakan. Pelaksana

kebijakan dituntut menjadi disiplin dan ketat dalam menjalankan beberapa kebijakan. Dalam konteks lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif juga diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik agen pelaksana tersebut.

- d. Komunikasi antar organisasi. Standar tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para agen pelaksana. Setiap implementator harus memahami standar yang telah ditetapkan dan tujuan yang akan dicapai.
- e. Disposisi (sikap pelaksana). Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pengaruh kebijakan kepentingan kepentingan pribadinya. Meter dan Horn dalam Kurniawan & Maani, (2020) menyebutkan ada tiga jenis elemen respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu: a) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; b) arah respon para pelaksana kebijakan seperti penerimaan, penolakan, atau netral, dan; 3) intensitas terhadap kebijakan.
- f. Kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan cara yang diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

Menurut teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Ravyansah et al (2022) disebutkan bahwa diperlukan identifikasi variabel dalam menganalisis pengimplementasian suatu kebijakan. Adapun variabel tersebut terdiri dari:

- a. Mudah tidaknya masalah tersebut untuk dikontrol.
 - 1) Kesulitan-kesulitan teknis
 - 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - 3) Persentase pelaksana sasaran kebijakan dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - 4) Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai
- b. Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi.
 - 1) Kelugasan dan konsistensi terhadap tujuan
 - 2) Dipergunakannya teori kausalitas
 - 3) Rekrutmen pejabat pelaksana
- c. Pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai variabel terhadap keseimbangan dalam mendukung kebijakan.
 - 1) Situasi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - 2) Adanya support politik serta dukungan dari pejabat atasan
 - 3) Komitmen dalam melaksanakan kebijakan
 - 4) Gaya kepemimpinan pejabat pemerintah pelaksana

Menurut Subarsono Dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, (2020:89-92) Keberhasilan emplementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau factor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang

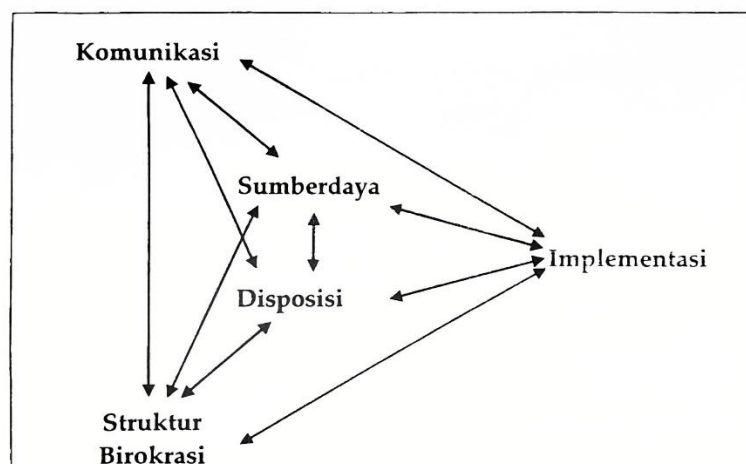
berbagai variabel yang terlibat dalam emplementasi, Teori yang mendukung emplementasi ini salah satunya teori dari George C. Edwads III (1980).

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikssi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementsi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber Edwards III, 1980:148

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila ada implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumentasi saja.

3. Disposisi

Disposisi Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam Buku Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi

(Subarsono, 2020:99-100) Teori Donald.S Van Meter dan Carl E. Van Horn

(1975) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisasikan.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

3. Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tercapainya keberhasilan suatu program.

Dalam Buku Pengantar Manajemen, Muslikhah, dkk. (2024:38) Menurut

Luther Gullick dampak langsung terhadap implementasi. Menurut Luther Gullick untuk mengukur keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada tujuh faktor yang menentukannya, yakni:

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan yang kata dasarnya "rencana" pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama di suatu institusi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian.

3. Staffing (Penyusunan Staf)

Pengisian jabatan (staffing) akan mempengaruhi "kepemimpinan dan pengendalian". Pengisian jabatan mengharuskan adanya pendekatan dengan sistem terbuka (open-system approach). Pengisian jabatan dilaksanakan di dalam institusi, yang pada gilirannya mempunyai hubungan dengan lingkungan luarnya.

4. Directing (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.

5. Penganggaran (Anggaran)

Penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.

6. Reporting (Pelaporan)

kegiatan penyampaian informasi mengenai perkembangan, hasil kegiatan, atau pemberian keterangan terkait segala hal yang terjadi dalam sebuah organisasi kepada pihak atasan atau mereka yang berwenang (kepala eksekutif/manajer).

4. Konsep Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

1. Peran Kepala Desa

Peranan berasal dari kata “Peran” dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam pembangunan Desa, yaitu kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan mengurus perencanaan pembangunan di desanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Kepala Desa sebagai Motivator, merupakan motivasi, dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa,

sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Menurut Effendi Motivasi adalah kegiatan memberi dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.

- b. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
- c. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator, merupakan orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

2. Desa dan Pemerintah Desa

Istilah Desa dalam Undang-undang No.5/1979 pasal 1 yang dimaksud dengan Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembangunan Infrastruktur Jalan

- a. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya kurang maksimal.

b. Pembangunan Jalan

Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air.

5. Kerusakan Jalan

Menurut Baihaqi, ddk. (2025) Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti beban lalu lintas berlebih, kualitas konstruksi yang kurang memenuhi standar, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, hingga faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi, genangan air, dan drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan yang muncul pada perkerasan jalan biasanya berupa retak memanjang, retak kulit buaya, rutting, lubang, dan pengelupasan permukaan. Masing-masing bentuk kerusakan memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap fungsi jalan. Retak kulit buaya misalnya, menunjukkan kegagalan struktural

akibat kelelahan material perkerasan. Sementara itu, lubang biasanya merupakan kerusakan lanjutan akibat masuknya air ke dalam lapisan perkerasan. Kondisi-kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berkembang cepat apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat.

Kerusakan jalan merupakan permasalahan yang umum terjadi pada berbagai kelas jalan di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan, kenyamanan berkendara, efisiensi perjalanan, serta kualitas lingkungan sekitar. Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Jalan yang berfungsi dengan baik mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menghubungkan wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Di Indonesia, khususnya di daerah kabupaten dan kota, kondisi jalan merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan infrastruktur publik. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan di banyak daerah masih menghadapi masalah kerusakan yang cukup serius. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas infrastruktur, tetapi juga mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

2. Dampak Jalan Yang Rusak

Menurut Abdelwahed dalam Imam (2025), *“Road damage is a significant cause of vehicle damage, pedestrian injuries, and road accidents. When vehicles encounter severe road defects at high speeds, they may experience sudden steering deviations, increasing the risk of crashes.”* Kerusakan jalan merupakan salah satu penyebab utama

kerusakan kendaraan, cedera pada pejalan kaki, hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi lalu melewati jalan yang rusak parah, seperti lubang atau permukaan yang tidak rata, kendaraan bisa tiba-tiba kehilangan kendali atau arah. Hal ini membuat risiko kecelakaan menjadi jauh lebih besar, karena pengemudi tidak selalu sempat bereaksi dengan cepat terhadap kondisi jalan yang buruk.

3. Dampak Dalam Sektor Perekonomian

Menurut Annisa ddk. (2024) dalam Jurnal Dampak Jalan Rusak Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dan Sosial. Diberbagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya dapat berkembang pesat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur, khususnya jalan, menjadi penghambat utama bagi kemajuan daerah tersebut. Jalan rusak yang tersebar di berbagai wilayah tidak hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga berdampak buruk terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat. Curah hujan tinggi yang terjadi di berbagai wilayah terutama pada musim penghujan menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan masalah kronis yang berdampak luas. Jalan rusak ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara tetapi juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial.

Seperti yang kita ketahui, Jalan merupakan tulang punggung sistem transportasi darat, yang berperan vital dalam menunjang

distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk, dan aksesibilitas keberbagai sektor ekonomi. Kondisi jalan yang buruk menyebabkan peningkatan biaya transportasi, penurunan efisiensi logistik, dan hambatan bagi akses pasar, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah tersebut, Menjadi faktor utama penyebab kerusakan jalan. Jalan yang rusak sangat berdampak luas, tidak hanya pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian. Kerusakan jalan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Seperti, Terhambatnya akses Pendidikan dan kesehatan, Menurunnya kualitas hidup, dan Terhambatnya pembangunan daerah. Jalan rusak menyulitkan akses masyarakat ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, hal ini sangat berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil. Selain itu juga membuat masyarakat sulit untuk beraktivitas dengan lingkungan sekitar dan menghambat pemabangunan di daerah tersebut. Implementasi pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi suatu fisik daerah tentang fasilitas-fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah.

6. Sistem Manajemen Jalan Terhadap Jalan Yang Rusak

Menurut Siswanto, dkk. (2017) Terhitung sejak awal 1980-an, sejumlah sistem manajemen telah dikembangkan di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan dan pemeliharaan.

Sistem manajemen jalan terdiri dari serangkaian langkah-langkah proses dalam kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Langkah-langkah proses tersebut awalnya banyak manual tetapi pada akhirnya banyak menggunakan fasilitas komputer sebagai alat bantu penyimpanan data dan pemroses data. Umumnya langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pengumpulan data infrastruktur dan lalu-lintas
2. Penyimpanan dan pengolahan data
3. Perencanaan dan program pekerjaan jalan di masa akan datang
4. Desain dan persiapan kontrak
5. Pelaksanaan dan pemantauan pekerjaan

Diakui secara luas adanya masalah akut dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemeliharaan jalan di Indonesia, termasuk sebagian besar jalan daerah, terlepas dari mekanisme penyerahan hasil yang digunakan, pembangunan dan pemeliharaan jalan ditandai oleh kurangnya mekanisme akuntabilitas teknis yang efektif.

Program pemeliharaan perkerasan jalan yang akuntabel dan efektif adalah yang dirancang dengan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu tingkat pelayanan jalan yang diharapkan dan ketersediaan dana. Dengan keterbatasan alokasi dana yang terjadi pada jalan kabupaten maka perlu

dilakukan strategi yang tepat untuk dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan.

Program pemeliharaan perkerasan jalan dirancang dengan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu indeks permukaan jalan yang diharapkan dan ketersediaan dana. Untuk mendapatkan suatu program pemeliharaan yang baik maka kriteria yang harus dipenuhi adalah dengan mengoptimalkan dua hal tersebut di atas, dimana tingkat pelayanan jalan tidak terabaikan dan biaya pemeliharaan jalan tidak terlalu besar. Besarnya anggaran pemeliharaan jalan merupakan bagian dari kebijakan publik yang akan menentukan kualitas pelayanan jalan.

Pemeliharaan jalan bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan jalan secara efisien dan efektif, agar kondisi jaringan jalan selalu dalam keadaan baik. Konsep pemeliharaan jalan dalam pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari lima komponen utama yaitu database, perencanaan umum, penyusunan program, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dimana kelima komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dilakukan melalui proses yang mengoptimalkan kinerja jaringan jalan dari waktu ke waktu. Rukka (2023).

5. Penyusunan Bank Data (Data Base)

Melalui pengumpulan data dan survei lapangan, tahapan pertama dikembangkan suatu data base mampu menampung banyak data mengenai kondisi geografis dan geometrik jaringan jalan dengan segala permasalahan dan kondisinya

6. Perencanaan Umum (Planning)

Tahapan ini dilakukan sebuah identifikasi kebutuhan pemeliharaan jalan secara keseluruhan. Kegiatan ini terdiri dari analisis jaringan jalan secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan biaya jangka menengah/jangka panjang berdasarkan target yang telah ditetapkan.

7. Pemrograman (Programming)

Tahapan ini dilakukan kegiatan kelayakan pekerjaan pemeliharaan untuk dilakukan pada waktu satu tahun kedepan. Kegiatan ini ditentukan oleh program tahunan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan masing-masing ruas jalan, baik berdasarkan biaya yang telah diperkirakan maupun berdasarkan biaya yang sudah ditentukan. Analisis lebih detail dilakukan ruas per ruas untuk menentukan biaya dan prioritas penanganan dengan kondisi ruas dan dana yang tersedia. Program tahunan ini bertujuan mempersiapkan usulan pengajuan dan pemeliharaan jalan secara rutin tahunan.

8. Persiapan Pelaksanaan (Preperation)

Tahapan ini dibuatkan desain untuk pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan satu tahun kedepan. Kegiatan yang dihasilkan yakni perencanaan teknik secara mendetail dan persiapan dokumen kontrak / dokumen tender yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang, maka dari itu,

pembagian pekerja dapat dilakukan dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan. Setelah dokumentasi telah siap, maka dapat diserahkan pada panitia tender untuk dilakukan proses pengadaan kontraktor.

9. Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan (Operation & Evaluation)

Tahapan ini merupakan implementasi, operasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan ini meliputi aktifitas operasi pemeliharaan yang sedang berjalan, monitoring, dan pengendalian. Kegiatan ini dilakukan oleh unsur-unsur yang terkait dalam organisasi proyek, antara lain seperti: Tim Konsultan supervisi dan pengawasan. Di bagian evaluasi ini dilakukan kajian baik pada hasil maupun alokasi dana dan target yang ditentukan yang hasilnya akan menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya. Hasil setiap bagian disimpan dalam bank data yang dapat dipergunakan untuk penyusunan program kedepan.

C. Kerangka Pemikiran

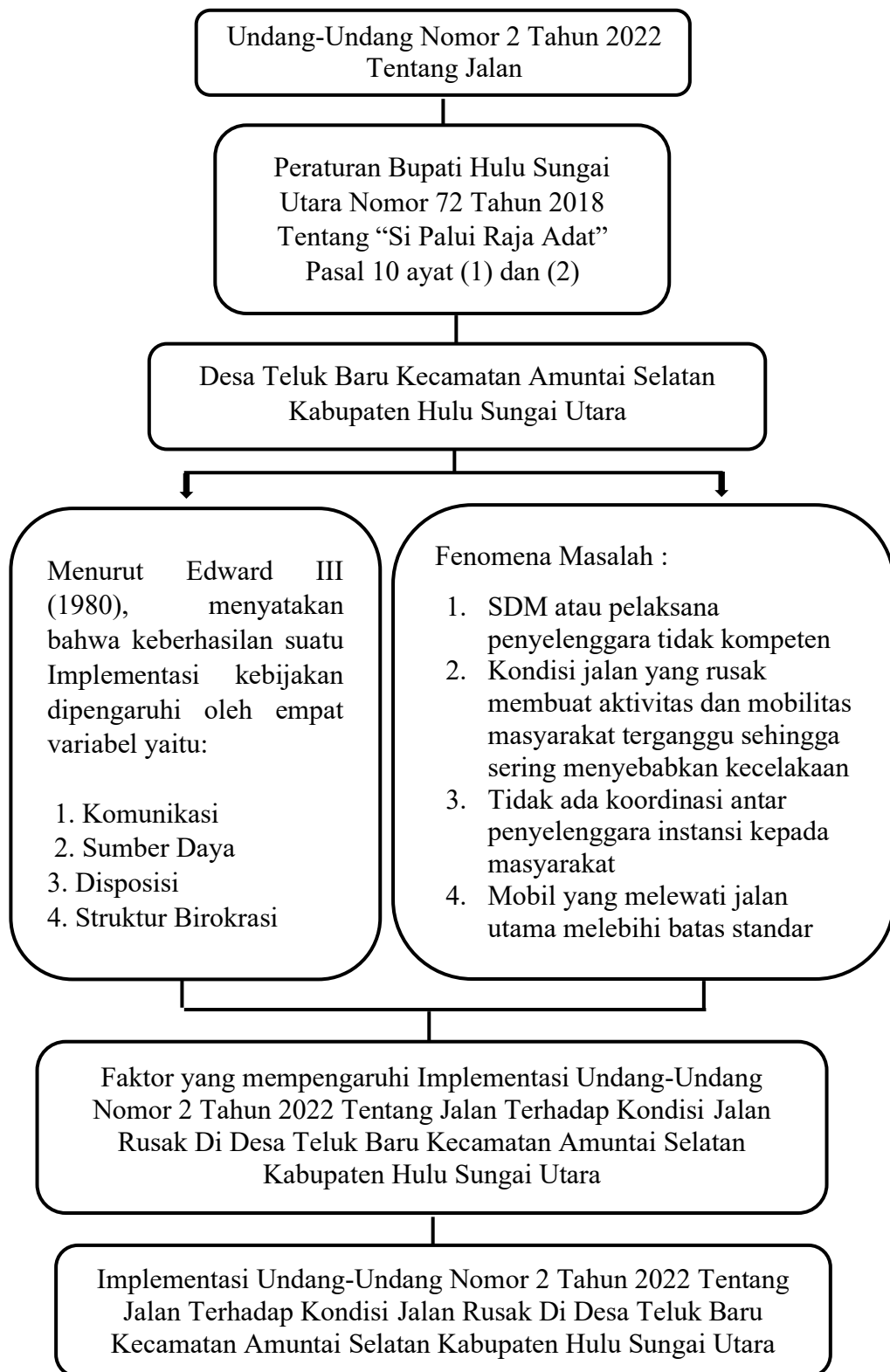
Dalam buku Metodologi Penelitian (DR. Agung Edy Wibowo : 2020) Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta berkaitan antar variabel yang direliti.

Permasalahan yang ada pada Implementasi Kebijakan, (1) SDM atau pelaksana penyelenggara tidak kompeten, (2) Kondisi jalan yang rusak

membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat terganggu sehingga sering menyebabkan kecelakaan, (3) Tidak ada koordinasi antar penyelenggara instansi kepada masyarakat, dan (4) Mobil yang melewati jalan utama melebihi batas standar muatan, maka dari itu difokuskan berdasarkan George C. Edward III dalam Ravyansah et al (2022:68), faktor-faktor penentu implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Kantor Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71452, kode kemendagri 63.08.04.2004. Desa Teluk Baru ini termasuk daerah rawa yang sering kali terendam banjir setiap tahun antara waktu rentan waktu dua bulan, desember sampai januari. Desa Teluk Baru ini terbagi menjadi dua jalan yaitu jalan daerah (jalan utama) dan jalan desa. Jalan di Desa Teluk Baru menghubungkan ke jalan Desa Cangkring, Desa Teluk Paring, Desa Ujung Murung dan Desa Jarang Kuantan.



B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau realita yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitian tersebut.

Dalam Buku Ajar Penelitian Metodologi Penelitian; Teori dan Praktek (Tamaulina, ddk. 2023:75) Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang situasi sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi dalam konteks sosial tersebut, mengidentifikasi hipotesis, dan melihat pola hubungan yang pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. Pentingnya menyusun dasar teori untuk penelitian memiliki alasan yang kuat untuk memperkuat kredibilitas penelitian yang dilakukan. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain:

1. Pernyataan yang spesifik tentang spekulasi teoritis memberikan pembaca kesempatan untuk mengevaluasi dengan kritis.
2. Kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pandangan yang sudah ada. Dengan dipandu oleh prinsip yang relevan, peneliti diberikan landasan untuk menetapkan asumsi dan memilih metode penelitian.
3. Mengartikulasikan pandangan teoritis yang berasal dari kajian penelitian memaksa kita untuk merespons pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana suatu gejala terjadi. Ini memungkinkan kita untuk berpindah dari

sekadar mendeskripsikan suatu peristiwa yang diamati menuju generalisasi tentang berbagai faktor yang memengaruhinya.

4. Adanya teori memungkinkan identifikasi batasan generalisasi. Kerangka kerja teoritis membantu dalam menentukan variabel kunci yang memengaruhi suatu fenomena yang menarik, memberikan pemahaman tentang bagaimana variabel-variabel tersebut dapat berbeda dan dalam kondisi apa

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:137).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017:137).

2. Sumber Data

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak Kantor Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan, Kantor PUPR Kabupaten

HSU, Kantor Satlantas Polres HSU, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa Teluk Baru. Hal ini dikarenakan agar mendapatkan hasil yang benar-benar akurat.

Sumber data dipilih dengan teknik informasi menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah kumpulan informasi-informasi dari anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut. Informan penelitian yaitu:

Tabel 3.1
Informan

No	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Staf Dinas PUPR	1 Orang
2.	Kepala Desa Teluk Baru	1 Orang
3.	Sekretaris Desa Teluk Baru	1 Orang
4.	Ketua BPD Desa Teluk Baru	1 Orang
5.	Katua RT Desa Teluk Baru	5 Orang
6.	Anggota Satlantas Polres HSU	1 Orang
7.	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		12 Orang

E. Desain Oprasional Penelitian

Desain Operasional Penelitian adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2017:103).

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Edward III (1980) dalam Implementasi ada empat aspek, yaitu:	1. Komunikasi	a. Transmisi (Pemberitahuan Program) b. Kejelasan c. Konsekuensi
	2. Sumberdaya	a. Staff b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. <i>Standard Oprating Procedure</i> (SOP) b. Fragmentasi (Koordinasi antar pelaksana kebijakan)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat di kumpulkan.

Teknik data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam Buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2022:215)

Observasi atau pengamatan Adalah upaya mengamati objek yang diteliti

termasuk lingkungan, tindakan, dan peristiwa yang melingkup objek yang diamati.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notolensi rapat keputusan pimpinan dan lain sebagainya. Dokumen eksternal berupa bahan bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran buletin, surat pernyataan dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Spradley dalam Hardani Et al (2020:232) Analisis data dilakukan secara berurutan melalui proses analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya. Mile dan huberman dalam Abdussamad (2021:160-162) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris. Dengan memadatkan, peneliti membuat data lebih kuat. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara tersebut dan dipilih untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Seperti yang kita lihat, kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi data antisipatif adalah terjadi ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Sebagai data hasil pengumpulan, data Proses kondensasi atau transformasi berlanjut setelah kerja lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, ini adalah bagian dari analisis. Data kondensasi adalah bentuk analisis yang mempertajam, mengurutkan,

memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa agar kesimpulan "akhir" dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan kondensasi data, tidak selalu berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat berubah dalam banyak cara seperti melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui keberadaan dimasukkan dalam pola yang lebih besar, dan seterusnya. Kadang-kadang, mungkin bermanfaat untuk mengubah data (misalnya, analis memutuskan bahwa pelayanan yang dilihat memiliki tingkat "tinggi" atau "rendah" kualitas pelayanannya), tetapi ini tidak selalu diperlukan.

2. Data Penyajian (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017:270) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari (Sugiyono, 2017:270-271).

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2017:272).

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono, 2017:273).

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. (Sugiyono, 2017:275).

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikumpulkan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2017:275).

6. Melakukan *Member Check*

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. (Sugiyono, 2017:275).

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ibrahim, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Afif, dkk (2023). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Malang*. Universitas Brawijaya, Malang
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arafat (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Aura Riva Aliyda. (2025). *Kualitas Jalan Di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). *Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Pt. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)*. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Studi Media.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Kurniawan W, Maani K, (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn*. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 72 Tahun 2018 Tentang “Si Palui Raja Adat” (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Dan Rambu Jalan Angkutan Darat).
- Pramono Joko. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UNISRI Press
- Purnadi. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Jalan Melalui Proses Musyawarah Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

- Ravyansah, S.B, dkk. (2022). *Kebijakan Publik*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sharla dan Harlis. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda)*. Universitas Mulawarman.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
- Wibowo Edy Agung (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Insania, Cirebon
- Widiastuti Ika (2022). *Kebijakan Publik*. PT Insan Cendekia Mandiri Group
- Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Edisi Revisi-2*. Bandung: Alfabeta.
- Annisa, d. (2024). Dampak Jalan Rusak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial DI Kabupaten Indragini Hulu. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Malang: 2023.
- Harun, d. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas . *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 133-156 .
- Irawan, d. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Departemen Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong* , 562-564.
- Iriawan. (2024). *Teori Kebijakan Publik* . Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Marwiyah. (2022). *Dalam Buku Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Musliliah, d. (2024). *Pengantar Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahman, A. (2016). Policy Implementation: Some Aspects and Issues. *Journal of Community Positive Practices*, XVI, 3-12.

- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamaulina. (2024). *Metodelogi Penelitian*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
- Widiastuti. (2022). *Kebijakan Publik*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.